Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)
Volume 06 Nomor 01 Tahun 2024(Hal : 94-100)
DOI : https://doi.org/10.35310/jass.v6i1.1283
https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jass/
ISSN 2685-8347 (Print) ISSN 2685-8355 (Online)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and, Good Government Governance in Indonesia and Malaysia

Icih[1] *, Putri Leonita Agustin[2], Asep Kurniawan[3],Mohammad H. Holle[4], Zumaroh[5]
[1] STIE Sutaatmadja – Jln. Otto Iskandardinata No.76 Subang
[2] STIE Sutaatmadja – Jln. Otto Iskandardinata No.76 Subang
[3]STIE Sutaatmadja – Jln. Otto Iskandardinata No.76 Subang
[4]IAIN Ambon – Jln. Dr. H. Tarmizi Taher Ambon
[5]IAIN Metro – Jln. Ki Hajar Dewantara No.15A Metro
good government governance

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :
Tgl. Masuk : 01-05-2024
Tgl. Diterima : 17-06-2024
Tersedia Online: 31-06-2024

Keywords:
good government governance;
IPSAS

ABSTRACT

The application of government accounting standards is one part of good government governance. Most countries in the world have realized the importance of applying international standards for accounting (IFRS) and auditing (ISA). This is done to show the country's role in the international community. Developments in the application of international standards in the private sector have not kept pace with developments in the public sector (IPSAS), including ASEAN countries. Human resources and supporting infrastructure is one of the problems faced by ASEAN countries in implementing IPSAS. Based on this, the purpose of this study is to determine the level of IPSAS disclosure in ASEAN government financial reports for the year ending 2019-2020.The exploratory quantitative method is the method used in this study with data analysis using descriptive statistics. Indonesia and Malaysia were selected as samples. Implementation of IPSAS disclosures in the 2019 by Indonesia State is 34% and Malaysia State is 29%. In 2020 IPSAS disclosure by the Indonesian State is 45% and Malaysia State is 30%. The results of the study show that although the application of IPSAS in Indonesia is greater than in Malaysia, in general IPSAS disclosure in these two countries still needs to be improved.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara mendirikan perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara atau yang dikenal dengan ASEAN. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi kerja sama antar negara dalam lingkup asia tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota dengan 5 negara pelopor yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina, ditambah dengan Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adapun tujuan didirikannya ASEAN berdasarkan Deklarasi Bangkok diantaranya yaitu: 1) mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan asia tenggara, 2) meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional, 3) meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, 4) memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada, 5) meningkatkan kerjasama untuk

memajukan pendidikan, dan penelitian di kawasan asia tenggara. Selain itu, ASEAN menciptakan kerjasama di beberapa bidang antara lain bidang perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan rakyat dan pengurangan kesenjangan pembangunan di lingkup ASEAN.

ASEAN yang beranggotakan 10 negara, saat ini menerapkan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Pembentukan MEA atau ASEAN Economic Community ini untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN yaitu mencapai Kawasan ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, membawa anggota ASEAN keluar dari kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang adil dan berkelanjutan, MEA juga dibentuk sebagai bagian dari integrasi ekonomi negara-negara ASEAN untuk mengatur perdagangan bebas antar negara ASEAN. Pembentukan MEA tersebut dilakukan guna memperkuat perekonomian ASEAN yang sempat terpuruk sejak krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, serta bersaing dengan India dan Cina sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Pemerintah memiliki peran dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance). Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip demokrasi dan demokratisasi yang mencerminkan tingginya aspek perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintahan yang baik juga dapat dipandang sebagai konsep ideologi politik yang mencakup prinsip-prinsip inti pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nampak bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi masih menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan pemerintahan yang baik secara menyeluruh. Tata pemerintahan yang baik merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan di negara ini yang akan membantu menyatukan peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai pemahaman bersama di mana implementasi dapat dipertimbangkan dan efektif dan efisien.

Secara umum, pemerintah yang dianggap memiliki tata kelola yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu bagaimana pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangannya berupa informasi yang disediakan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dapat menghadirkan kualitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan melihat pengungkapan dalam laporan keuangan, para pengguna dapat mengetahui beberapa informasi penting tentang bagaimana pemerintah mengelola negara, terutama seberapa baik akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan. Laporan keuangan biasanya memiliki standar akuntansi. Secara umum, semua negara ASEAN menerbitkan laporan keuangan pemerintah dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Namun International Federation of Accountants (IFAC), melalui International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), menyusun International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) sebagai acuan panduan internasional tentang standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Citra Sukmadilaga et al (2015) dengan menggunakan daftar periksa pengungkapan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) tahun 2011, menyatakan bahwa secara umum, pemerintah Indonesia dan Malaysia masih kekurangan dalam hal pengungkapan laporan keuangan. Di Indonesia tingkat pengungkapan selama dua tahun yakni tahun 2012 dan 2013 sekitar 16%, sedangkan di Malaysia lebih buruk karena lebih rendah dibawah 10%.

Penelitian ini meneruskan penelitian Citra Sukmadilaga et al (2015) dengan menambah pengungkapan sesuai IPSAS 2018. IPSAS sebagai dasar standar akuntansi pemerintahan terus mengalami perkembangan, berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa perlu meneliti bagaimana perkembangan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan

pemerintah di negara ASEAN, khususnya di Indonesia dan Malaysia untuk tahun yang berakhir 2019-2020 sesuai dengan data terakhir yang diperoleh pada saat penelitian.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *New Public Management* (NPM)

Menurut Mahmudi, *New Public Management* (NPM) adalah teori administrasi publik yang berpendapat bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik daripada praktik manajemen sektor publik. Sedangkan menurut Friedrichsmeier, *New Public Management* (NPM) adalah kumpulan ide, filosofi politik, metode, teknik, dll yang digunakan untuk mereformasi administrasi publik. Golembiewski mengatakan bahwa *New Public Management* (NPM) merupakan upaya untuk membebaskan administrasi publik dari kendala konservatisme manajemen klasik dengan memasukkan prinsip-prinsip sektor swasta ke dalam teknik rekayasa publik untuk mengubah administrasi publik menjadi lebih baik dengan menggabungkan prinsip-prinsip yang berbeda dari sektor swasta dengan sektor publik (Erawan, 1999).

Good Government Governance

Pemerintahan atau government diartikan sebagai *"the authoritative direction and administration off the affairs of men/women in a nation, state, city, etc."* yang berarti "pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya" sedangkan istilah kepemerintahan yaitu *governance*. *Governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dari keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disususun untuk mendatangkan implementasi keputusan. Menurut Rizkya *et al* (2013) *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance, international governance, national governance* dan *local governance.* Pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintahan diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, sehingga kekayaan negara yang dikuasai oleh pemerintah benar-benar mencapai tujuan kesejahteraan dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam administrasi publik tidak lepas dari persoalan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, karena perspektif keuangan publik menempati posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa. Jenis, jumlah dan dampaknya terhadap pembangunan, keberlanjutan dan stabilitas perekonomian nasional (Sari, 2012). Oleh karena itu, tujuan *good governance* tercapai dalam suatu negara yang dipandang sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik bukanlah hal yang mudah karena banyak kendala dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di negara ini.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang signifikan tentang kondisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor selama periode tersebut. Laporan keuangan digunakan terutama untuk menentukan nilai dana yang digunakan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, menilai kondisi ekonomi, menilai efektivitas dan efisiensi unit pelaporan, dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah sendiri adalah laporan keuangan yang disusun sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan memegang peranan penting dalam mengungkapkan informasi secara transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menutup kesenjangan dan mengurangi kemungkinan asimetri informasi antara agen dan klien. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku umum menjadi pedoman penyusunan LKPP.

***International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)**

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB). IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik untuk yang masih menganut basis kas (*cash basis*) maupun yang telah mengadopsi basis akrual (*accrual basis*). IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu kepada *International Financial Reporting Standards* (IFRS), standar akuntansi yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB), sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam IFRS dapat diterapkan di sektor publik. Cakupan IPSAS adalah standar akuntansi untuk aplikasi oleh Pemerintah nasional, regional (misalnya, negara bagian, propinsi, teritorial) Pemerintah lokal (misalnya kota) Pemerintah dan badan pemerintah terkait (misalnya, lembaga, dan komisi). Standar IPSAS secara luas digunakan oleh organisasi antar pemerintah. IPSAS tidak berlaku untuk badan usaha pemerintah.

Rasio Pertumbuhan

Growth Ratio (Rasio Pertumbuhan) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan tingkat persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu. *Growth ratio* biasanya dimanfaatkan untuk menghitung pertumbuhan atau kinerja di berbagai instansi, misalnya pada perusahaan, pemerintahan, dsb. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Growth Ratio* (Rasio Pertumbuhan) sebagai rumus untuk menghitung persentase terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah di Indonesia dan Malaysia untuk tahun 2019 dan 2020 dengan berdasarkan pedoman *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* tahun 2018. Adapun rumus rasio pertumbuhan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Pertumbuhan = \frac{Pendapatan\ Tahun\ t - Pendapatan\ tahun\ (t-1)}{Pendapatan\ Tahun\ (t-1)}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif secara kuantitatif. Penelitian eksploratif bertujuan untuk menggali secara luas mengenai sebab-sebab atau hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya sesuatu dan digunakan ketika kita belum mengetahui. Metode penelitian eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relative mendalam. Selain menggunakan metode deskriptif, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kuantitaftif. Menurut Arikunto (2006:12) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Populasi pada penelitian ini yaitu negara ASEAN, namun peneliti hanya memilih dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia serta sampel dalam penelitian ini yaitu laporan

keuangan pemerintah pusat di Indonesia dan penyata kewangan kerajaan persekutuan di Malaysia untuk tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai tahun pengamatan karena merupakan data terbaru dari laporan keuangan pemerintah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan studi literatur. Studi literatur termasuk pada kategori sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau didapat melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) melalui media cetak dan internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun rapi dalam arsip (data dokumen) yang telah dipublikasikan.

Definisi dan Operasional Variabel

***Good Government Governance* (X)**

Secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai "pemerintah" yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. *Governance* merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan atau kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar periksa pengungkapan IPSAS tahun 2018 yang meliputi:

1. *General Information* (Informasi Umum)
2. *Presentation of Budget Information* (Penyajian Informasi Anggaran)
3. *Statement of Financial Positions* (Laporan Posisi Keuangan)
4. *Statement of Cash Flow* (Laporan Arus Kas)
5. *Statement of Changes in Net Assets/Equity* (Laporan Perubahan Aktiva Bersih/Ekuitas)
6. *Notes of Financial Statements* (Catatan atas Laporan Keuangan)
7. *Presentation of Financial Statements* (Presentasi dari Laporan Keuangan)
8. *Cash Flow Statements* (Laporan Arus Kas)
9. *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* (Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan Akuntansi)
10. *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates* (Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing)
11. Borrowing Costs (Biaya Pinjaman)
12. *Consolidated and Separate Financial Statements* (Laporan Keuangan Konsolidasi Terpisah)
13. *Investments in Associates* (Investasi pada Rekanan)
14. *Interests in Joint Ventures (Kepentingan dalam Usaha Patungan)*
15. *Revenue from Exchange Transactions* (Pendapatan dari Transaksi Bursa)
16. *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies* (Pelaporan Keuangan di Ekonomi Hiperinflasi)
17. *Construction Contracts* (Kontrak Kontruksi)
18. *Inventories* (Persediaan)
19. *Leases* (Sewa)
20. *Events after the Reporting Date* (Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan)
21. *Financial Instruments: Disclosure and Presentation* (Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Penyajian)
22. *Investment Property* (Property Investasi)
23. *Property, Plant, and Equipme*nt (Properti, Pabrik, dan Peralatan)
24. *Segment Reporting* (Pelaporan Segmen)
25. *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* (Ketentuan, Kewajiban Kontijensi dan Aset Kontingen)
26. *Related Party Disclosures* (Pengungkapan Pihak Terkait)

27. *Impairment of Non-Cash-Generating Assets* (Kerugian Aset yang tidak Menghasilkan Uang)
28. *Disclosure of Financial Information about the General Government Sector* (Pengungkapan Informasi Keuangan tentang Sektor Pemerintah Umum)
29. *Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)* (Pendapatan dari Transaksi Non-tukar (Pajak dan Transfer))
30. *Presentation of Budget Information in Financial Statements* (Presentasi Informasi Anggaran dalam Laporan Keuangan)
31. *Employee Benefits* (Imbalan Kerja)
32. *Impairment of Cash-Generating Assets* (Kerugian Aset Penghasil Kas)
33. *Agriculture* (Pertanian)
34. *Financial Instruments: Presentation* (Instrumen Keuangan: Presentasi)
35. *Financial Instruments: Recognition and Measurement* (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)
36. *Financial Instruments: Disclosures* (Instrumen Keuangan: Pengungkapan)
37. *Intangible Assets* (Aktiva Tidak Berwujud)
38. *Service Concession Arrangements: Grantor* (Pengaturan Konsesi Layanan: Pemberi)
39. *First-time Adoption of Accrual Basis IPSASs* (Adopsi IPSAS Dasar Akrual Untuk Pertama Kali)
40. *Separate Financial Statements* (Laporan Keuangan Terpisah)
41. *Consolidated Financial Statements* (Laporan Keuangan Konsolidasi)
42. *Investments in Associates and Joint Ventures* (Investasi pada Asosiasi dan Ventura Bersama)
43. *Joint Arrangements* (Pengaturan Bersama)
44. *Disclosure of Interests in Other Entities* (Pengungkapan Kepentingan Entitas Lain)
45. *Employee Benefits* (Imbalan Kerja)
46. *Public Sector Combination* (Kombinasi Sektor Publik)

Adapun beberapa tambahan pengungkapan pada IPSAS 2018 dari IPSAS 2011 yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu antara lain *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, Consolidated and Separate Financial Statements, Construction Contracts, Revenue from Non-Exchange Transactions, First-time Adoption of Accrual Basis IPSASs, Separate Financial Statements, Joint Arrangements, Disclosure of Interests in Other Entities* dan *Public Sector Combination.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Indonesia dan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Malaysia pada tahun 2019 dan 2020. Data dari laporan keuangan pemerintah tersebut nantinya dapat diketahui bagaimana tingkat pengungkapan laporan keuangannya sesuai dengan standar *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* tahun 2018 dengan menggunakan rumus rasio pertumbuhan *(growth ratio)*. Adapun hasil dari analisis tersebut adalah dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

Disclosure Matters	Indonesia		Malaysia	
	2019	2020	2019	2020
General Information	100%	100%	100%	100%
Presentation of Budget Information	47%	360%	101,48%	99,27%
Statement of Financial Positions	65,49%	6,03%	11,95%	11,59%
Statement of Cash Flow	16,98%	22,95%	-13,32%	27,00%
Statement of Changes in net assets/equity	264%	-12,76%	3,16%	3,60%
Notes of Financial Statement	3%	22%	14,02%	14,71%
Presentation of Financial Statements	65%	6,03%	0,00%	0,00%
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates	2,72%	1,68%	0,00%	0,00%
Borrowing Costs	6,73%	15,55%	-19%	59%
Consolidated and Separate Financial Statements	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investments in Associates	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Interests in Joint Ventures	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Revenue from Exchange Transactions	-95%	145%	0,00%	0,00%
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Construction Contracts	5,13%	17,86%	0,00%	0,00%
Inventories	9,65%	30,02%	10,70%	13,06%
Leases	-4%	-8%	105,37%	183,50%
Events after the Reporting Date	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Financial Instruments: Disclosure and Presentation	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Investment Property	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Property, Plant, and Equipment	9,05%	9,83%	0,00%	0,00%
Segment Reporting	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	36,80%	36,80%	6,91%	7,75%
Related Party Disclosures	103,49%	38,58%	0,00%	0,00%
Impairment of Non-Cash-Generating Assets	8,84%	0,57%	0,00%	0,00%
Disclosure of Financial Information about the General Government Sector	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)	6,48%	-6,69%	0,00%	0,00%
Presentation of Budget Information in Financial Statements	47%	360%	101,48%	99,27%
Employee Benefits	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Impairment of Cash-Generating Assets	-5,27%	26,56%	0,00%	0,00%
Agriculture	2,22%	1,75%	43,00%	0,00%
Financial Instruments: Presentation	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Financial Instruments: Recognition and Measurement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Financial Instruments: Disclosures	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Secara umum, pemerintah Indonesia dan Malaysia masih kekurangan dalam hal pengungkapan laporan keuangannya. Di Indonesia tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah untuk tahun 2019 sebesar 34% dan Malaysia sebesar 29%, sedangkan tahun 2020 pemerintah Indonesia memberikan pengungkapan sebesar 45% dan Malaysia sebesar 30%. Ada beberapa alasan penyebab mengapa negara Indonesia dapat memberikan lebih banyak pengungkapan daripada negara Malaysia, meskipun baik Indonesia maupun Malaysia belum sepenuhnya menerapkan IPSAS dalam pembuatan laporan keuangannya, namun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia dikembangkan berdasarkan beberapa standar akuntansi, salah satunya IPSAS. Sedangkan laporan keuangan di Malaysia masih dikembangkan dengan basis modifikasi kas, dan belum sepenuhnya menerapkan IPSAS. Ada beberapa faktor juga mengapa pengungkapan tersebut masih (0,00%), ini dapat terjadi karena berbagai alasan seperti ada beberapa butir dalam IPSAS yang tidak berlaku dalam pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia atau Malaysia, minimnya beberapa transaksi di pemerintahan dan standar akuntansi di pemerintahan Indonesia dan Malaysia tidak memberikan persyaratan untuk pengungkapan khusus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Implementasi *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)*, *studi kasus pada* pemerintah Indonesia dan Malaysia maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Meskipun dalam laporan keuangan pemerintah Indonesia memberikan pengungkapan yang lebih banyak dibandingkan dengan laporan keuangan Malaysia. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu melanjutkan upayanya untuk meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangannya di masa yang akan datang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan antara lain: 1) Pemerintahan Indonesia dan Malaysia harus menyelaraskan standar akuntansi di negara mereka dengan IPSAS. Meskipun tidak sepenuhnya mengadopsi IPSAS, upaya ini akan mempersempit kesenjangan antara standar akuntansi saat ini dan IPSAS, dan meningkatkan tingkat pengungkapan di masa mendatang. 2) Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus memperkuat infrastruktur pelaporan keuangan. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa sumber daya manusia, kebijakan manajemen dan dukungan pemerintah termasuk infrastruktur yang paling penting untuk dikembangkan. Karena penelitian ini masih bersifat eksploratif,

penelitian ini memiliki banyak kelemahan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan lebih banyak negara lagi yang dapat diteliti agar mengetahui bagaimana tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintahnya dengan menggunakan standar *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) sebagai pedoman dalam hal pengungkapannya.

REFERENCES

Arikunto, Suharsimi (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Citra Sukmadilaga *et al.* 2015. Implementasi Good Governance di Sektor Publik: Analisis Eksplorasi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah di Seluruh Negara-Negara ASEAN. Procedia – Ilmu Sosial dan Perilaku 211 (513-518). Bandung.

Erawan, I Ketut P. 1999. Political Reform and Regional Politics in Indonesia. Asian Survey. Vo 39. No 4. pp. 588-612

Ferdinand, A. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponergoro.

International Public Sector Accounting Standards Board. 2011. *Handbook of Pronouncements of International Public Accounting Standards Board* Vol I, Vol II dan Vol III tahun 2018

Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara

Pemerintah Pusat Malaysia. 2019. Penyata Kewangan Kerajaan Malaysia Tahun 2019

Pemerintah Pusat Malaysia. 2020. Penyata Kewangan Kerajaan Malaysia Tahun 2020

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Republik Indonesia. 2019. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019

Republik Indonesia. 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020

Rizkya, Ovrie Maha Putra, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah, “Innovative Government pada PDAM Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan”, jurnal administrasi publik, Vol. 1, No. 5, (Malang: Unbraw, 2013) Hlm. 920.

Sari, D. (2012). Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta